

Mengurai Fenomena Mantan Penguasa Libya Muammar Khadafi

Libya's Muammar Gaddafi makes the state different from any country, is the principle of democracy that took place was with Islamic socialism. Diffusion of power is not there at all accumulation of power in the hands of the individual and no balance of opposition. Gaddafi so obsessed become the leader of the Arab world. Gaddafi's stubborn attitude and very against the West makes his position quite vulnerable, then the figures backed Libya secretly plotting the overthrow of his power, but failed. NATO supported the opposition succeeded in occupying the Gaddafi residential compound, since that power held over four decades already vanished, the uniqueness of the leadership style of living memory.

Keyword: Ruler dictator, human characteristics, the system of socialism.

Mengurai Fenomena Mantan Penguasa Libya Muammar Khadafi

Libya Muammar Gaddafi membuat negara yang berbeda dari negara manapun, adalah prinsip demokrasi yang terjadi adalah dengan sosialisme Islam. Difusi kekuasaan tidak ada sama sekali akumulasi kekuasaan di tangan individu dan tidak ada keseimbangan oposisi. Gaddafi begitu terobsesi menjadi pemimpin dunia Arab. Sikap keras kepala Gaddafi dan sangat menyerupai Barat membuat posisinya cukup rentan, maka yang bertindak sebagai pendukung Libya diam-diam merencanakan penggulingan kekuasaan, tapi gagal.

NATO mendukung oposisi berhasil menduduki kompleks perumahan Gaddafi, karena kekuatan yang berlangsung selama empat dekade sudah lenyap, keunikan gaya kepemimpinan memori hidup.

Kata kunci: Penguasa diktator, karakteristik manusia, sistem sosialisme.

Oleh :
Bedjo Sukarno
FISIP UNISRI

Pendahuluan

Kekuasaan memungkinkan kelompok-kelompok dan individu-individu yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dan untuk mengeksploitasinya, kelompok dan individu lain menentang dominasi dan eksploitasinya dengan berusaha melawan dan membinasakannya. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum, tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus. Kekuasaan adalah alat untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan `kota adil` menurut Aristoteles (Maurice Duverger, 1998 : 27). Individu-individu dan kelas-kelas tertindas, orang miskin, dan orang-orang malang serta yang tidak puas atau setuju bahwa kekuasaan menjamin ketertiban, akan tetapi hanyalah yang menyembunyikan dominasi pemegang hak istimewa yang sedikit jumlahnya.

Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar, bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslavia, Polandia, Honggaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia serta Tiongkok. Menurut George Dimitrov seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. (Miriam Budiardjo, 2010:157)

Libya merupakan salah satu negara di Afrika yang kenang penjajahan, pada abad 16 penguasa yang bercokol di negara tersebut adalah kekaisaran Ottoman dari Turki. Tak hanya Libya saja yang dikuasai Ottoman ketika itu, tapi Aljazair dan Tunisia juga dijajah. Kekaisaran Ottoman akhirnya tumbang oleh perlawanan kekuatan lokal yang dikenal sebagai prajurit Janissary, sejak itu penentuan penguasa atas Libya didasarkan pada garis keturunan kekeluargaan dan tradisi ini berlangsung hingga abad 18.

Kendati tanahnya tidak subur, saat itu Libya bisa hidup dari perdagangan dan pemasukan dari pelabuhan lautnya, Tripoli, yang cukup strategis di kawasan Mediterania. Selain hidup dari berdagang, Libya juga mendapat pemasukan dari para bajak laut yang berpangkalan di kota Tripoli. Namun keberadaan bajak laut yang secara ekonomi menguntungkan Libya, membuat negara-negara yang memiliki armada besar di lautan seperti Inggris, Perancis dan Italia sangat terganggu, mereka sering menjadi korban pembajakan dan mengalami kerugian besar.

Akibat selanjutnya, tiga negara itu sepakat melancarkan pembasmian terhadap bajak laut dan operasinya berlangsung sukses. Singkatnya, usai PD. II, Libya dan Italia melakukan perundingan damai dan atas restu PBB pada 24 Desember 1951. Libya resmi berdiri sebagai negara merdeka dengan nama United Kingdom of Libya. Dengan sistem monarki dan kondisi perekonomiannya masih carut-marut, pemimpin Libya Raja Idris sekaligus memutuskan bergabung ke Liga Arab.

Libya juga menjadi pangkalan militer Inggris dan Amerika Serikat, menurut Raja Idris keberadaan pangkalan itu dapat menunjang perekonomian nasional, tapi kemudian tidak terlalu lama mengalami kemerosotan dan kemiskinan. Pada 1958, Libya tiba-tiba menjadi negara yang berpotensi makmur karena tambang-tambang minyak mulai ditemukan, sehingga negara-negara Barat pun mulai masuk lagi ke Libya karena berpengaruh adanya penemuan sumur-sumur minyak itu. Tapi eksplorasi yang dilakukan negara-negara Barat tak segera memakmurkan rakyat dan hanya keluarga kerajaan saja yang tampak hidup makmur.

Melihat kondisi tak adil itu dan kecenderungan Raja Idris yang pro Barat memunculkan ketidakpuasan di kalangan militer. Ketidakpuasan memuncak ketika pada September 1969 pecah

kudeta yang dipimpin oleh seorang perwira militer berpangkat kapten dan baru berusia 27 tahun bernama Moammar Khadafi. Aksi kudeta itu sendiri telah direncanakan oleh Khadafi saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah.

Kudeta Khadafi disamping mampu menumbangkan monarki Raja Idris juga mengubah total wajah politik Libya. Perubahan drastis yang dilaksanakan Khadafi antara lain menerapkan *sistem sosialisme* dan *hukum negara sesuai dengan syariat Islam*.(Angkasa, 2006:72) Khadafi kemudian bukan hanya menjadi pemimpin tertinggi politik, ekonomi dan militer di negeri itu, namun melalui demokrasi massa yang dia kembangkan, tapi dia juga menguasai suara rakyat. Sejak itu, Khadafi menjadikan dirinya sebagai obyek pemujaan rakyat Libya, dari hari ke hari Libya diwarnai pemujaan luarbiasa, panjang dan telanjang terhadap sosok Khadafi.

Dari beberapa pidatonya sebelum kejatuhan, Khadafi tampak sekali emosional dan seolah bingung terhadap apa yang sedang terjadi. Dia rupanya belum bisa menerima kenyataan bahwa rakyat yang mendewa-dewakannya selama ini ternyata berani menentang, bahkan hendak mengusir pemimpinnya itu keluar dari Libya. Dia kemudian menyalahkan siapa saja atas kehancuran Libya, dan menyalahkan semua pihak, para pemuda yang dia sebut tikus busuk, Amerika, media massa asing hingga Al Qaeda.

Dia adalah salah seorang pemimpin dunia yang paling ambisius dan haus dengan nama besar. Di dalam negeri dia membuat negara Libya berbeda dengan negara manapun, Libya adalah negara yang secara formal tidak memiliki konstitusi, parlemen, dan pemerintahan apalagi partai politik. Menurut Kredo Khadafi dalam bukunya Al Kitab Al Ahdhar, Libya diperintah, diatur dan diawasi langsung oleh rakyat.

Itulah prinsip demokrasi langsung atau yang disebutnya dengan *sosialisme Islam*. Adanya perwakilan dalam parlemen berarti telah mengebiri kekuasaan rakyat untuk memerintah, mengatur dan mengawasi negara. Karena itu, partai politik kendati pernah ada pemilu di Libya, bukan hanya dilarang, namun juga dipandang sebagai musuh rakyat dan negara.

Pada kenyataannya, yang disebut suara seluruh rakyat secara langsung itu adalah kehendak Khadafi sendiri. Badan tertinggi untuk rapat seluruh rakyat adalah Kongres Umum Rakyat, sekretaris jendral badan tertinggi itu selamanya dipegang langsung oleh sang kolonel, jabatan tersebut tidak boleh diganti atau diganggu gugat, sebab menurut Khadafi, orang menduduki jabatan itu adalah konsekuensi otomatis dari takdir sejarah.(Ibnu Burdah, 2011)

Sistem Sosialisme

Sesungguhnya sosialisme sebagai sesuatu kekuatan politik, yang penting dapat dikatakan timbul sebagai akibat dari kapitalisme industri modern. Sepanjang kenyataan bahwa sosialisme mengandung di dalamnya satu unsur proses terhadap perbedaan tingkat sosial dan tidak ada gerakan yang dapat menamakan dirinya sosialis dengan tidak menyatakan protes, karena itu meletakkan kepercayaannya dalam hak milik produktif dan usaha yang kolektif untuk membawa kesejahteraan yang maksimum kepada rakyat.

Sosialisme, menentang kapitalisme dalam beberapa hal, akan tetapi ini adalah bukan perang total dari seorang asing terhadap seorang asing. Tapi dalam hal khusus berkenaan dengan kemiskinan, sosialisme merubah dari kapitalisme sebuah tujuan pokok yaitu mempertahankan kesatuan kerja dan hak milik, untuk dipunyai dan diselenggarakan oleh satu orang atau keluarga, juga didasarkan pada sistem sosial dengan prinsip kolektif dalam pemilikan alat-alat produksi dan distribusi.

Pada hakikatnya, sosialisme menempatkan kesejahteraan individu di bawah kesejahteraan seluruh masyarakat. Di dalam sistem ini, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dimiliki oleh negara, sisanya menjadi milik individu dan diusahakan secara perorangan melalui badan-badan usaha yang ada.

Tetapi juga kebanyakan pemerintah sangat otoriter, terdapat hubungan yang agak erat antara sosialisme dan otoritarisme ini terjadi merupakan akibat dari berbagai variable yang melakukan persamaan-persamaan sosial. Walaupun demikian jelas bahwa kebanyakan pemerintahan tanpa memandang sistem ekonominya atau ideologi yang menopangnya, telah ditandai oleh pemusatan kekuasaan di tangan-tangan elit-elit yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang dikuasainya.

Tidaklah diragukan kalau pemerintah yang otoriter mengambil ilhamnya dari keyakinan agama, dalam kenyataannya pemerintah yang mengatur keyakinan dan perilaku para penganut kepercayaan yang telah membudaya adalah pemerintahan yang otoriter. Ini pula yang terjadi pada kekuasaan politik yang disandarkan pada ajaran agama, sesuai dengan penafsiran tokoh agamanya. (PadmoWahyono & Nazarudin S, 1995:140)

Bukan saja dalam teori tetapi dalam praktek pun sosialisme paling tidak berhasil dengan baik mengatasi persoalan jaminan suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata diantara berbagai golongan masyarakat, yang mendorong terjadinya keseimbangan sosial. Konsep sosialisme berupaya menghapuskan pranata kekayaan pribadi sehingga seperti raja-raja feodal pun berhasil dihancurkan.

Masyarakat sosialis juga mendorong timbulnya rasa disiplin dan tujuan sosial yang ternyata sesuai dengan tekanan perhatian Islam pada tanggung jawab kolektif. Selanjutnya konsisten dengan cita-cita Islam mengenai para penguasa, terdapat suasana kesederhanaan yang penuh keprihatinan pada golongan yang memerintah dalam masyarakat sosialis, (Naqvi, 1985, dalam Oman Sukmana, 2005:260).

Namun, meskipun terdapat beberapa kemiripan nyata antara Islam dan sosialisme, tetapi sosialisme adalah tidak Islami. Argumentasi yang menentang sistem sosialisme, termasuk terhadap semua sistem non-Islami, sebagian besar bersifat moral yang dalam pandangan Islam bersifat menentukan. Menurut pandangan Islam manusia bergerak maju di sepanjang jalan lurus keharmonisan sosial bahkan perbedaan jenis kelamin, warna kulit dan kebangsaan cenderung menyatu.

Dalam perseptif yang lainnya, Islam mengakui bahwa jika dan bilamana hukum universal keseimbangan dihalang-halangi, maka akan timbul usaha dan perjuangan untuk mengadu yang tertindas dengan penindas. Dalam kondisi bagaimanapun dan kapan pun hal demikian itu terjadi, maka Islam akan senantiasa memihak kepada kaum miskin, lemah, dan tertindas.

Menurut Islam, negara ideal adalah yang memiliki keselarasan sosial. Dipandang dari sudut itu, perjuangan golongan merupakan pengecualian bukannya kaidah. Mengenai wataknya, pendekatan Islam terhadap keseimbangan secara konseptual dan kualitatif berbeda dengan pandangan Marx mengenai lebarnya jurang pemisah antara persepsi moral dari kedua sistem tersebut. Sosialisme, di samping memberikan jaminan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil memusatkan ekonomi riil dan kekuasaan politik di tangan negara.

Jadi, pengaruh keseluruhan dari perbaikan sosial atas keseimbangan menjadi tidak menentu, terpusatnya semua kekuasaan di tangan pemerintah elit termasuk merusak keseimbangan sosial yang diupayakan oleh sosialisme agar berkembang lewat distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Di lain pihak, Islam mendorong adanya pembagian ekonomi dan kekuasaan politik yang merata diantara berbagai bagian dalam masyarakat.

Kehendak bebas dan pertanggungjawaban, tidak dapat terus hidup di bawah tekanan kolektifitas yang memiliki sifat ekstrem tak wajar dalam masyarakat sosialis. Mengenai moral, dalam pandangan sosialis manusia tampak terikat pada beban tanggung jawab kolektif yang berlebihan, hingga menghancurkan kebebasan manusia. berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka Islam menyeimbangkan keinginan bebas dengan pertanggungjawaban dan meletakkannya dalam pandangan keseluruhan yang menerima bahwa manusia dilahirkan bebas.

(Oman Sukmana, 2005:263)

Bagi yang menganut faham keagamaan yang berlainan (non conformity), kemerdekaan bagi kesadaran pribadi juga merupakan kebebasan secara sukarela berorganisasi dalam perkumpulan kaum yang sama kepercayaan. Prinsip berkumpul secara sukarela ini kemudian diterjemahkan dari pengertian agama menjadi pengertian politik sehingga menjadi prinsip hidup masyarakat yang bebas dan demokratis. Faham non konformis tidak saja memberikan pandangan keagamaan yang praktis, juga merupakan sumber dalam gerakan buruh, bagi idealisme, pengabdian moral dan dari kesungguhan yang menjadi ciri dari gerakan itu sendiri.

Apabila orang mempelajari organisasi intern dari beberapa faham non konformis, maka orang akan berasumsi terhadap persamaannya dengan organisasi serikat-serikat sekerja. Mereka merupakan persatuan dan badan-badan sukarela yang terikat secara longgar dan berserikat satu dengan yang lain secara bebas. Betapa kompleksnya dasar keagamaan dari sosialisme modern juga menjadi jelas dengan kenyataan bahwa humanism rasional yang tidak bersifat keagamaan telah memainkan peranan yang penting pula dalam evolusi cara berpikir dan bertindak sosialis.

Oleh karena itu, Islam menolak kekerasan tak wajar dalam kerja. Manusia membutuhkan waktu senggang maupun waktu kerja untuk menjaga keseimbangan yang wajar antara usaha dan rohaninya. Dengan demikian, bahwa sosialisme dan agama dapat bercampur, asal percampuran itu dilakukan dengan semangat yang tepat.

Karakteristik Individu Muammar Khadafi sebagai Penguasa.

Baik itu manusia sebagai seorang individu, dalam kelompok-kelompok dan klas-klas sosial yang melaksanakan kekuatan politik selalu menjamin bagi dirinya posisi untuk memegang kekuasaan. Semakin banyak kekuasaan politik yang dimiliki seseorang, semakin besar pula bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, akan tetapi pengaruhnya semakin besar juga seseorang tadi di dalam kekuasaan politik.

Di dalam perjuangan politik sebagaimana dalam persaingan, yang terbaik dan menang adalah yang paling bermutu dalam intelegensinya, keberaniannya, kekuatannya, kelicikannya dan kemampuannya bekerja. Kepentingan pribadi merupakan motif yang utama di dalam perjuangan politik, sedang kekuasaan dicari bagi keuntungan dirinya. bukan karena dedikasi bagi pelayanan umum. oleh sebab itu keberhasilan adalah milik mereka sesuai kemampuan atau bakat yang melekat pada dirinya.

Menurut teori konservatif yang paling mampu adalah mereka yang paling baik kualitas moral dan keputusan nilai, didasarkan pada pemahaman bahwa manusia secara alami jahat, dan dimotivasikan oleh naluri dan gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Senantiasa siap untuk berbalik kepada keadaan kebuasan primitif, hanya

beberapa individu yang dikaruniai kekuatan moral yang besar dan berhasil mengatasi kecenderungan pada tingkah laku tanpa memiliki pengalaman sebelumnya atau tanpa tujuan yang mendasar. Semua telah diperoleh sekelompok elit, meskipun adanya oposisi dan kecemburuan dari massa yang buta dan brutal.

Dalam persaingan, kaum elit tidak tergerak terutama oleh kepentingan diri sendiri, yang pasti tidak ada orang yang sempurna dan keuntungan kekuasaan, kekayaan dan prestise. Akan tetapi, elit dimotivasikan lebih-lebih oleh sense of service, rasa mengabdikan, suatu kesadaran bahwa kewajiban sosialnya adalah untuk berbuat demi kepentingan semua orang. Kaum konservatif percaya bahwa motif-motif yang murni ekonomi dan kepentingan diri sendiri adalah kasar dan tidak patut, bahwa untuk kebajikannya cenderung menggantikannya dengan motif yang lebih mulia, lebih mementingkan orang lain, dan motif yang menghimbau sampai kepada sensitivitas orang-orang terbaik. Untuk itu, pendidikan dan tradisi memperkuat rasa mengabdikannya. (Maurice Duverger, 1998 : 163)

Dari doktrin konservatif menyebutkan, bukan saja bakat yang dibawa sejak lahir yang menjadi dasar pembedaan antara elit dan massa, namun latihan sosial yang mengembangkan naluri-naluri yang baik dan menekan yang buruk. Individu-individu yang sangat berhasil baik tergolong dalam elit, karena pendidikannya, sehingga bisa mengangkat dirinya dari kebuasan dan egoisme aslinya untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beradab. Karena itu, kualitas pribadi yang membuatnya menjadi sebagian dari elit dan lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dalam persaingan.

Pemaparan tersebut menggambarkan sesuatu yang menyentuh kehidupan pribadi mantan penguasa Libya ketika itu yang serba misterius yaitu warisan turun - temurun dari ayahnya yang keturunan suku Baduy (Badawi), suku bangsa pengembara yang hidup di jazirah Timur Tengah, yang memimpin negaranya dengan tangan besi.

Masa kecilnya dihabiskan di wilayah gurun Sirte yang terik, walau begitu ia dididik secara ketat dalam soal agama Islam. Pendidikan tinggi ia dapatkan di fakultas Hukum Universitas Libya dan kemudian masuk ke akademi Militer di Benghazi, dua tahun kemudian ia dikirim ke Royal Academy Military Sandhurst Inggris, untuk memperdalam ilmu kemiliteran. Kembali ke Libya menandatangani pangkat opsir di Korps Sinyal, Moammar Khadafy sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang menonjol.

Di sekolah militer, ia melakukan gerakan bawah tanah yang menggagas gerakan revolusioner untuk mengubah sistem pemerintahan di Libya. Teman-teman semasa sekolah banyak yang bergabung dan membantunya dalam klandestin (secara rahasia) ini. Khadafi banyak mendapat

inspirasi dari Gamal Abdul Nasser, pemimpin Mesir yang sangat anti Barat dan amat mengidamkan Arab yang bersatu.

Berkaitan dengan sudut pandang karakteristik manusia, tampaknya merupakan sintesis dari beberapa pendekatan yang paling dominan seperti psikoanalisis yang melukiskan bahwa manusia sekali waktu menjadi makhluk yang secara membata menuruti kemauannya, tetapi pada waktu yang lain dari sisi pendekatan psikologi kognitif menjadi makhluk yang berpikir logis. Pada suatu saat manusia menyerah bulat-bulat pada proses pelaziman (conditioning) yang diterimanya dari lingkungan karena faktor behaviorisme, sedangkan pendekatan aspek psikologi humanistik yang menjelaskan bahwa pada saat-saat tertentu manusia berusaha mewarnai lingkungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya. (Jalaludin Rakhmat, 2003:23)

Bersama rekan-rekannya di militer, Khadafi melancarkan kudeta terhadap pemerintahan monarki Raja Idris I yang saat itu sedang berobat ke Turki, digantikan sementara oleh Sayyid Hasan yaitu keponakannya, raja berhasil diberhentikan dan pemerintahan diambil alih oleh Khadafi dan kawan-kawannya. Kemudian menyambung dengan revolusi sosial, dan menolak segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk ideologi kapitalisme dan komunisme.

Selanjutnya, Khadafi menggunakan prinsip-prinsipnya sendiri yang didasarkan pada prinsip *sosialisme Islam*, semboyan yang diusung adalah sosialisme, persatuan dan kebebasan. Salah satu jejak revolusi yang mungkin masih ada hingga meninggal adalah diubahnya sistem kepangkatan militer di negeri tersebut, yang menyetop kepangkatan kemiliteran hingga sampai kolonel saja. Sebagai pemimpin tertinggi, Khadafi bahkan sudah cukup puas dengan pangkat terakhirnya kolonel.

Baginya, pangkat tidaklah penting, bahkan sampai semasa hidupnya berkuasa pun tidak mempunyai jabatan resmi di pemerintahan Libya, meski secara de facto dirinya adalah pemimpin tertinggi. Difusi kekuasaan kepada semua rakyat itu dalam praktek tidak ada sama sekali, yang terjadi sebaliknya, *otokrasi*. Penumpukan kekuasaan di tangan individu, akibatnya kekuasaan Khadafi sama sekali tidak ada penyeimbangan, yang namanya partai oposisi dan parlemen tidak ada.

Khadafi tidak lain adalah raja Libya dengan kekuasaan yang tidak ada pembatasnya. Rasa haus kekuasaan juga membawa Khadafi kepada petualangan gila di kancah internasional. Sebagai pengagum orator ulung Jamal Abdul Nasir, Khadafi sangat terobsesi menjadi pemimpin besar dunia Arab, bahkan berupaya membuat konfederasi dengan beberapa Negara Arab berulang kali, namun selalu gagal.

Kekuasaan dalam sistem politik otokrasi cenderung bersifat pribadi, dan sebagian kecil lagi bersifat konsensus. Walaupun dalam kenyataan, otokrasi menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada para pejabat yang menjadi pembantunya, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak pelaksanaannya kekuasaan. Karena rakyat hanya memiliki sumber kekuasaan yang sedikit dan mengalami kesukaran dalam melakukan pengawasan terhadap pihak penguasa, maka dalam kekuasaan otokrasi ini bersifat negatif (paksaan) dari pada kekuasaan positif. (Ramlan Surbakti, 1992 : 222)

Pernah timbul dari benaknya tentang impiannya memimpin dunia Islam dan Afrika dengan melakukan uji coba menyatukan negara-negara Sahara Afrika dan bertualang untuk mendukung gerakan-gerakan subversif dan teror di berbagai negara. Hal serupa juga terjadi pada ranah ekonomi, menurut credo sosialisme yang dia bentangkan pada pihak yang mengurus modal-modal produksi adalah negara. Swasta hampir tidak memiliki kesempatan, dan lain teori pula prakteknya, bahkan keluarga, dan kroninya tidak hanya menjadi orang-orang yang kaya raya, namun juga perusahaan-perusahaan strategis milik negara tak ubahnya adalah milik pribadi. (Ibnu Burdah, 2011)

Khadafi secara sadar atau tidak telah memproyeksikan diri sebagai sosok teramat agung yang tak ada bandingannya di dunia. Konsep diri yang berlebihan itulah yang kemudian membebani dirinya untuk terus memaksa realitas sebagaimana proyeksi itu. Pada hal realitas sekarang sama sekali sudah berubah, sehingga terjadi perubahan penurunan kredibilitas sebagai penguasa tunggal yang tidak lagi dihormati oleh rakyatnya sendiri. Jarak antara proyeksi diri dan kenyataan terlalu berjauhan sehingga sikap dan tindakannya tidak bertumpu kepada kenyataan.

Berakhirnya Kekuasaan Khadafi di Libya

Setelah mengangkat dirinya sebagai pemimpin besar revolusi Libya dan perwira militer berpangkat kolonel. Khadafi kemudian menggalang koalisi dengan Mesir dan Suriah untuk meluncurkan revolusi kebudayaan di Timur Tengah. Tapi koalisi itu akhirnya buyar ketika dalam perang Arab-Israel, Mesir ternyata mau melakukan perjanjian perdamaian dengan Israel.

Sikap Khadafi yang keras kepala dan sangat anti Barat, membuat kedudukannya cukup rawan. Sejumlah tokoh Libya yang berada di Eropa dan didukung AS diam-diam merencanakan penggulingan kekuasaan Libya. Sekitar pertengahan tahun 1970-an upaya penggulingan kekuasaan itu mulai dilancarkan, tapi upaya kudeta ini berhasil digagalkan dan Khadafi membalasnya dengan cara mengirim pembunuh-pembunuh bayaran ke Eropa.

Hubungan Libya dan AS mengalami titik paling buruk, ketika massa membakar gedung Kedutaan Besar AS dilanjutkan dengan ditembak jatuhnya dua pesawat tempur Libya oleh AS di atas Teluk Sidra. Perkembangan berikutnya AS menutup kedutaannya di Tripoli dan sebaliknya

Libya juga menutup kedutaannya di Washington, sehingga hubungannya makin memburuk antara kedua negara tersebut. (Angkasa, 2006: 73)

Dilihat dari sudut penguasa, menurut AM. Lipset bahwa otoritas mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk rakyat itu. Jadi dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuannya, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap penguasa dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu penguasa dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal itu merupakan dukungan yang paling mantap. (Miriam Budiardjo, 2010 : 65)

Selanjutnya, kekuasaan dan pengaruh oleh Lasswel dan Kaplan (2010:66) dalam buku yang sama, dijelaskan bahwa kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat, hal itu merupakan proses ancaman jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

Seperti dimaklumi, Libya selama empat dekade di bawah kekuasaan Khadafi praktis tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan pelayanan umum sangat lemah. Hampir semua aset negara di bawah kontrol keluarga Muammar Khadafi. Rezim ini pernah mencoba melakukan reformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor minyak dan berupaya meningkatkan pelayanan negara, upaya itu tidak membuahkan hasil signifikan dan tidak dirasakan rakyat umum.

Kebijakan luar negeri Khadafi dilakukan sangat kontroversial berandil pula menyulitkan perekonomian Libya. Sejak tahun 1992 hingga 1999 mendapat sanksi larangan terbang dari dan ke Libya lantaran tuduhan Barat tentang keterlibatan rezim Khadafi atas jatuhnya pesawat Pan Am di Lockerbie, Skotlandia. Khadafi kemudian bertanggungjawab atas tragedi tersebut dan bahkan sanggup membayar ganti rugi sebesar 2,7 miliar dollar AS, sekaligus menyerahkan dua pelaku peledakan pesawat tersebut.

Kemudian ditambah mendapat sanksi ekonomi sejak tahun 1993 dan baru berakhir pada 2003. Tapi Libya juga mengimpor 90 persen kebutuhan pangan dari luar negeri, disamping itu Libya termasuk juga merupakan anggota OPEC sebagai penghasil minyak utama di Afrika. Libya sebelum revolusi memproduksi 1,8 juta barrel per hari dan cadangan minyaknya diperkirakan 42 miliar barrel, dan juga memiliki cadangan gas sekitar 1,5 miliar kubik.

Hubungan diplomatik Tripoli dengan Washington akhirnya terbuka kembali atau cair setelah Khadafi mengakui program senjata pemusnah massalnya. Hingga miliaran dollar AS mengalir

deras ke kocek Libya, pasalnya ketika itu perusahaan-perusahaan tambang minyak AS yang dulu kabur kembali berlomba-lomba masuk ke lading minyak Libya.

Ekspor minyak dapat mencapai 95 persen dari keseluruhan ekspor Libya ke luar negeri dan memberi 75 persen dana untuk anggaran belanja negara. Libya sejak berakhirnya sanksi larangan terbang dan ekonomi berusaha melakukan reformasi ekonomi dan berhasil meraih pertumbuhan 10,3 persen pada tahun 2010 (Kompas, 22/10/2011). Namun perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari aspek lain ketika itu kondisi politik di Libya yang terjadi bahkan sebaliknya, sebab kelompok oposisi sudah berupaya mengadakan perlawanan terhadap kebijakan penguasanya.

Di sisi lain, setelah kejatuhan Tripoli dan Bab al-Aziziya ke tangan pemberontak atau pihak oposisi, yang dibantu intelijen Pakta Pertahanan Atlantik Utara, mengarahkan segala upaya untuk memburunya, sedangkan keberadaan Moammar Khadafy dan keluarganya belum diketahui. Dalam hal ini pihak oposisi yang diwakili oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) melakukan langkah untuk memberitahukan pada siapapun yang dapat menangkap atau membunuh Khadafi akan diberi hadiah sebanyak dua juta dollar AS. Hadiah terbesar adalah bukan pemberian uang tetapi berupa amnesti, sebab sosok Khadafi masih dianggap figure yang berbahaya dari pada saat masih berkuasa.

Pihak dewan militer pemberontak telah membentuk pusat operasi khusus beranggotakan para perwira intelijen militer, tentara yang membelot, dan petugas keamanan yang ingin mencari Khadafi, sisa-sisa anggota rezim, dan pasukan pendukungnya. Dari team oposisi terus mengumpulkan informasi soal tempat, ukuran, serta arah setiap konvoi kendaraan yang mereka temukan. NATO memberikan dukungan peralatan pengintaian dan intelijen. Kantor berita Agence France Presse (AFP) tidak terlepas dari liputannya bahkan menyebut bahwa agen-agen Inggris dan Perancis diturunkan langsung ke lapangan.

Namun, perburuan yang dilakukan secara menyeluruh itu belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Khadafi. Sebaliknya, Khadafi terus menggunakan siaran radio dan televisi nasional Libya untuk menunjukkan dia masih ada di dalam negeri, bahkan bisa berjalan-jalan keliling kota tanpa ketahuan. Akhirnya kota Sirte itulah yang menjadi sasaran selanjutnya untuk direbut pasukan pemberontak. meski demikian kota itu masih gigih dipertahankan pasukan pro Khadafi yang bersenjata lengkap dan selalu setia melindunginya.

Sedangkan pada saat itu, beberapa suku Tuareg dari gurun Sahara sudah bergabung dengan pasukan oposisi serta membuka front pertempuran dengan pasukan pro Khadafi. Di pihak lain, AS sendiri masih punya keyakinan bahwa Khadafi belum keluar dari Libya karena belum ditemukan bukti-bukti telah meninggalkan negaranya. Ketika itu Khadafi sudah terlepas dari beban sebagai

kepala negara. Sekaligus sudah tidak punya kantor, istana atau markas yang mudah menjadi sasaran gempuran NATO atau pasukan oposisi.

Dengan latar belakang pengalaman yang dipunyai yaitu pernah membina jaringan teroris, Khadafi statusnya saat itu bisa membuat orang berbahaya, dan diduga masih memiliki banyak uang. Kemungkinan besar telah mengambil sebagian cadangan emas negara senilai 10 miliar dollar AS, dan untuk membiayai perlindungan dirinya dengan mencoba mempengaruhi tokoh-tokoh suku dan kelompok milisi untuk melindungi dirinya serta guna menyebar kekacauan, tetapi sebelumnya mereka sudah membelot untuk bergabung ke kubu oposisi.

Pertempuran bukan saja terjadi di Tripoli, melainkan juga di beberapa titik di Libya yang sudah lebih dari 95 persen dikuasai oposisi, meskipun masih ada penembak jitu berkeliaran. Tapi pertempuran belum usai walau frekuensi serangan loyalitas Khadafi mulai menurun, karena kelemahan posisi Khadafi juga makin nyata. Keadaan tidak akan mudah meski oposisi menguasai Tripoli, karena rezim Khadafi punya banyak taktik dan bisa melakukan apa saja yang tak terduga.

Khadafi masih mungkin ada di Tripoli walau kompleks huniannya di Bab al-Aziziya sudah dikuasai oposisi, rumahnya serta hunian putra dan putrinya dijarah. Dalam perkembangan lain di lapangan, Libya mengalami kekacauan logistik, terutama pasokan untuk rumah sakit, tempat para anggota pasukan oposisi mendapatkan perawatan. Hal mendasar adalah perlunya Dewan Transisi Nasional membiayai semua operasional pemerintahan lewat pengadaan dana segera.

Tatkala kaum oposisi yang didukung pasukan NATO berhasil memasuki dan menduduki kompleks pemukiman Muammar Khadafi, sejak itulah kekuasaannya mulai rontok. Kekuasaannya yang dipegangnya selama lebih dari empat dekade sirna sudah, keunikan dalam gaya dan penampilan sang kolonel kini tinggal kenangan. Malahan hingga disayembarakan untuk ditangkap, dan banyak orang bersorak kegirangan atas hilangnya takhta sang diktator.

Namun dari sisi prediksi lain, Duta Besar RI untuk Rusia Hamid Awaludin (Kompas, 25/10/2011) berpendapat bahwa ini tidak berarti kekerasan serta merta ikut hilang di Libya dan bisa jadi kepergian Khadafi justru awal dimulainya kekerasan dalam bentuk dan motif lain. Masih terlalu dini untuk memastikan bahwa Libya akan jadi negara demokratis dan damai dalam waktu dekat. Dewan Transisi Nasional Libya belum tentu mampu mengendalikan situasi di Libya secara damai pasca rezim Khadafi. Masalahnya, siapa pun kelak yang memegang tampuk kepemimpinan akan menghadapi masalah internal amat serius dan pelik, sebab adanya persaingan antara kelompok oposisi Khadafi dan pemberontak akan kian sengit. Jadi, NTC sebagai pihak yang mendapat mandat dari rakyat Libya harus berupaya membangun pemerintahan yang demokratis adalah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai pijakan agar nasib

Simpulan

Kejatuhan Khadafi tentu langsung disambut dengan penuh sukacita, gembira oleh mayoritas warga Libya dan pasukan pemberontak turun ke jalan dengan menembakkan senapan ke udara, dan membunyikan klakson mobil, juga oleh komunitas internasional mengingat reputasinya yang negatif selama berkuasa. Khadafi merupakan pemimpin yang menyimpan misteri, ditengah citranya yang baik di luar negeri karena berani melawan rezim Barat, memimpin negaranya dengan tangan besi.

Selama memimpin Libya, Khadafi tidak membolehkan ada penguasa lain di luar dirinya, dan tidak boleh siapa pun yang berbeda pandangan dengan dirinya baik melalui lisan maupun tulisan, bahkan tak segan-segan memenjarakan dan membunuh lawan politiknya. Sejak Tripoli jatuh, di tangan kaum revolusioner atau Dewan Transisi Nasional, kekuasaan Khadafi de facto sudah berakhir dan kemungkinan telah memastikan era demokrasi akan segera berkecambah. Meski demikian, jalan menuju demokrasi bukanlah hal mudah bagi rakyat Libya, itu karena mereka tidak punya pengalaman dan kultur berdemokrasi, tak ada konstitusi, partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan media independen yang kritis terhadap rezim.

Hingga kini, masih adanya indikasi keterpurukan Libya ke kubang krisis politik dan ekonomi berkepanjangan terlihat jelas dari campur tangan Barat/NATO yang terlalu jauh di negara itu. Media Barat sendiri mengakui bahwa tanpa campur tangan NATO sangat mustahil Dewan Transisi Nasional dapat dengan mudah menguasai kompleks tempat tinggal Khadafi. Indikasi lain adalah belum bersatunya kelompok oposisi Libya, khususnya yang tergabung dalam NTC, mereka hanya berhasil dipersatukan kemungkinan sedikit adanya iming-iming angin segar dari kekuatan NATO tentang masa depan yang lebih baik. Rakyat Libya bisa berfokus pada penguatan persatuan nasional dan membangun perekonomian, untuk itu NTC harus memastikan terbitnya konstitusi yang menjamin kesetaraan politik yang bermuara pada keadilan sosial dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih, dalam kebangsaan. Selanjutnya, bisa dimulai membangun kembali infrastruktur yang porak-poranda, dan membangun relasi antar negara, suku serta agama sehingga demokrasi bisa berjalan optimal tanpa intervensi kepentingan kelompok tertentu, memulihkan perekonomian, hingga membentuk pemerintahan baru yang bisa mewakili berbagai faksi yang tergabung dalam NTC.

Oleh karena itu, agar tak menimbulkan gejolak politik diperlukan aliansi yang diperluas dengan melibatkan negara-negara Arab, dan Libya mempunyai momentum menjadi negara yang kuat di dalam dan membangun aliansi yang terbuka dengan negara-negara lain.

Kepustakaan :

Anonim, 2006, Edisi Koleksi Angkasa, Gramedi, Jakarta.

Ibnu Burdah, 2011, Muammar Khadafi dan Angka 69, Jawa Pos (21/10), Surabaya.

Jalaludin Rakhmat, 2003, Psikologi Komunikasi, Remaja Karya, Bandung.

Miriam Budiardjo, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maurice Duverger, 1998, Sosiologi Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oman Sukmana, 2005, Sosiologi dan Politik Ekonomi, UMM, Malang.

Padmo Wahyono & Nazaruddin S, Pengantar Ilmu Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta.

Kompas, 22 Oktober 2011, Jakarta.

Kompas, 26 Oktober 2011, Jakarta.